



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian rencana kerja pada triwulan I dan II baik terhadap realisasi pencapaian target kegiatan maupun penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan. Dari hasil evaluasi tersebut diketahui perlunya dilakukan perubahan terhadap program dan kegiatan yang meliputi perubahan pagu, kelompok sasaran, target kinerja dan penghapusan kegiatan. Perubahan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkiraan SILPA kegiatan dalam tahun berjalan
2. Penghapusan kegiatan yang tidak mungkin dilakukan karena terjadinya perubahan kinerja dan kebijakan
3. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan
4. Perubahan atas dasar pertimbangan lain yang dirasa perlu dan mendesak

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2022 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sampai pada akhir Tahun Anggaran 2022.

Bukittinggi, 2022
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bukittinggi

NENTA OKTAVIA, S.STP, M.PA
NIP. 197810301998022001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	4
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	15
BAB IV PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2022 dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2022 ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja yang sudah berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 dan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2022.

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi memuat program dan kegiatan yang mengalami pergeseran, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif dan kelompok sasaran, baik yang dilaksanakan langsung oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi maupun yang melibatkan pihak lain.

Selanjutnya, Perubahan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2022 disusun dengan berlandaskan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan untuk memaksimalkan pelaksanaan rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD hingga akhir tahun anggaran 2022 dalam mewujudkan visi dan misi yang telah disepakati.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 ini adalah :

1. Sebagai bentuk antisipasi dalam menyikapi perubahan regulasi dan perkembangan keadaan yang tidak sesuai lagi dengan perencanaan yang telah disusun pada tahun sebelumnya.
2. Sebagai bentuk partisipasi dan dukungan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi.
3. Sebagai pedoman bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dalam melaksanakan program dan kegiatan hingga akhir Tahun 2022.
4. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
5. Sebagai Bahan Evaluasi dan Pengendalian Anggaran Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja SKPD yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan perubahan program dan kegiatan terkait dengan pergeseran, penghapusan atau penambahan kegiatan, perubahan target kinerja, perubahan pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup terkait dengan catatan penting ataupun rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Dalam rangka penilaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, pencapaian tujuan, hasil dari program, kegiatan dan sub kegiatan, dipandang perlu melakukan evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan.

Evaluasi merupakan bagian dari proses perencanaan untuk memperoleh umpan balik hasil rencana yang kemudian dapat digunakan untuk penyempurnaan rencana atau kebijakan yang telah disusun sebelumnya. Evaluasi juga merupakan sebuah penilaian terhadap jalannya rencana yang dilakukan secara periodik atau berkala selama proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan atau setelah implementasi rencana yang dioperasionalkan pada waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan Anggaran pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi sebesar Rp 6.695.027.099 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1.676.456.769 Belanja Barang dan Jasa Rp 3.247.922.804 dan Belanja Hibah sebesar Rp 1.770.647.526,- yang digunakan untuk mendukung 6 (enam) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan.

Dengan adanya beberapa kebijakan yang kemudian dilakukan refocusing terhadap program/kegiatan/sub kegiatan, sehingga terdapat perubahan atau pergeseran terhadap Anggaran Belanja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi menjadi sebesar Rp.6.012.081.229,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.1.727.346.769,-, Belanja Barang dan Jasa Rp.3.025.651.534,-, Belanja Hibah Rp.1.010.647.526,-, dan Belanja Modal Rp. 248.435.400,- Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan mengalami penundaan, bahkan pembatalan pelaksanaan.

Beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun ada beberapa kegiatan terkendala pelaksanaannya pada triwulan I dan II karena adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi di lapangan. Untuk mengatasi kendala tersebut difasilitasi melalui pergeseran anggaran. Beberapa kegiatan yang tercantum dalam DPA tahun 2022 yang mengalami pergeseran/perubahan adalah:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah, melakukan pergeseran terhadap Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada rincian Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan pergeseran Belanja Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa dari

seluruh Kegiatan dipindahkan ke Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, melakukan perubahan/penambahan terhadap Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada rincian Belanja Honorarium dan Belanja Modal, pergeseran terhadap Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan pada rincian Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak , pergeseran terhadap Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada rincian Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik; melakukan pergeseran terhadap Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada rincian Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Honorarium Tim Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua, Belanja Modal Komputer Unit Lainnya dan Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya.
4. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah melakukan pergeseran/perubahan pada rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan.
5. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah melakukan perubahan/pergeseran pada

rincian Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan.

6. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; melakukan pergeseran terhadap rincian Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi telah melakukan evaluasi untuk meninjau sejauh mana pencapaian target sasaran strategis dan pendanaan yang telah ditetapkan. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selama proses pelaksanaan penganggaran pada Tahun Anggaran 2022, dilakukan dengan melihat realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan baik dari sisi serapan anggaran maupun capaian fisik/kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II (kondisi bulan Juni 2022) yang menunjang pencapaian kinerja dan sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta capaian sasaran strategis Kepala Daerah.

Hasil evaluasi Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan, antara lain:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Semua kegiatan di atas belum terealisasi sama sekali (0%).

2. Realisasi sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan, sebagai berikut:

Dari 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 sub kegiatan yang dianggarkan pada Tahun 2022, maka persentase sub kegiatan yang telah dilaksanakan/berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan mencapai sebesar 19,83% atau 19 (sembilan belas) sub kegiatan. Dengan asumsi bahwa ada yang melampaui target, sama dengan target dan di bawah target.

3. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan sampai Triwulan II adalah sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dari 12 orang gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan direalisasikan untuk 14 orang ASN karena ada ASN yang pindah masuk ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Jika dilihat dari tingkat penyerapan anggaran kegiatan-kegiatan untuk Tahun 2022 sampai dengan triwulan II baru mencapai 19.83% atau sebesar Rp.1.327.766.004,- dari total anggaran sebesar Rp 6.695.027.099,-. Adapun target fisik yang harus dicapai sebesar 62 % dengan realisasi mencapai nilai 38%.
5. Secara umum faktor penyebab tidak/kurang tercapainya target kinerja keluaran untuk kegiatan yang telah direncanakan dikarenakan adanya *refocussing* sebanyak 2 (dua) sub kegiatan.

Rekapitulasi Evaluasi Renja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1.					
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik					
sampai dengan Triwulan II Tahun 2022					
No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Triwulan II		Sisa Anggaran
			(Rp)	(%)	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1.860.027.369	Rp 699.462.610	37,60%	Rp 1.160.564.759
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 7.225.000	Rp -		Rp 7.225.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 7.225.000		0,00%	Rp 7.225.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.618.321.769	Rp 604.974.839		Rp 1.013.346.930
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.618.321.769	Rp 604.974.839	37,38%	Rp 1.013.346.930
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 111.677.000	Rp 52.892.689		Rp 58.784.311
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 764.000		0,00%	Rp 764.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 12.000.000	Rp 8.719.100	72,66%	Rp 3.280.900
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 6.933.000	Rp 4.739.000	68,35%	Rp 2.194.000
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 8.436.000	Rp 1.522.000	18,04%	Rp 6.914.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 83.544.000	Rp 37.912.589	45,38%	Rp 45.631.411
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 31.945.000	Rp 14.492.182		Rp 17.452.818
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.485.000	Rp 1.400.000	94,28%	Rp 85.000
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 30.460.000	Rp 13.092.182	42,98%	Rp 17.367.818
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 90.858.600	Rp 27.102.900		Rp 63.755.700
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 30.150.000	Rp 9.602.975	31,85%	Rp 20.547.025

11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 5.400.000	Rp 2.150.000	39,81%	Rp 3.250.000
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 55.308.600	Rp 15.349.925	27,75%	Rp 39.958.675
02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 272.820.000	Rp 9.171.150	3,36%	Rp 263.648.850
6	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 272.820.000	Rp 9.171.150		Rp 263.648.850
13	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 238.820.000	Rp 1.332.000	0,56%	Rp 237.488.000
14	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 34.000.000	Rp 7.839.150	23,06%	Rp 26.160.850
03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 2.872.417.276	Rp 530.243.312	18,46%	Rp 2.342.173.964
7	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp 2.872.417.276	Rp 530.243.312		Rp 2.342.173.964
15	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 78.726.750		0,00%	Rp 78.726.750
16	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 2.793.690.526	Rp 530.243.312	18,98%	Rp 2.263.447.214
04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 813.335.500	Rp 20.882.410	2,57%	Rp 792.453.090
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 813.335.500	Rp 20.882.410		Rp 792.453.090
17	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 43.236.000	Rp 6.033.000	13,95%	Rp 37.203.000
18	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 770.099.500	Rp 14.849.410	1,93%	Rp 755.250.090

05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp 353.525.630	Rp 32.543.149	9,21%	Rp 320.982.481
9	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 353.525.630	Rp 32.543.149		Rp 320.982.481
19	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 53.708.880	Rp 2.065.000	3,84%	Rp 51.643.880
20	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 299.816.750	Rp 30.478.149	10,17%	Rp 269.338.601
06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 522.901.324	Rp 43.312.523	8,28%	Rp 479.588.801
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp 522.901.324	Rp 43.312.523		Rp 479.588.801
21	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 522.901.324	Rp 43.312.523	8,28%	Rp 479.588.801
TOTAL		Rp 6.695.027.099	Rp 1.335.615.154		Rp 5.359.411.945

**TABEL 2.2
REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022**

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI					
BULAN : JUNI					
No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1.860.027.369	NILAI SAKIP SKPD	A	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 7.225.000	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	80%	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 7.225.000	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	1 dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.618.321.769	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.618.321.769	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	15 orang	12 orang
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 111.677.000	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 764.000	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 komponen	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 12.000.000	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	24 jenis	24 jenis

5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 6.933.000	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 jenis	4 jenis
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 8.436.000	Jumlah tamu yang dilayani	100 orang	43 orang
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 83.544.000	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	50 dokumen	16 dokumen
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 31.945.000	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.485.000	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	1000 surat	380 surat
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 30.460.000	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	100 Mbps	100 Mbps
			Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	1 rekening	1 rekening
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 90.858.600	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	80%	
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Rp 30.150.000	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	3 unit	3 unit
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 5.400.000	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6 unit	3 unit
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 55.308.600	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	1 unit
02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 272.820.000	JUMLAH KONFLIK SOSIAL DI BUKITTINGGI	9 KASUS	
6	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 272.820.000	Jumlah kasus penyimpangan ideologi negara	0 kasus	
13	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 238.820.000	Jumlah Pelaksanaan Upacara	5 upacara	2 upacara
14	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 34.000.000	Jumlah peserta yang mendapatkan pengetahuan bela negara	40 orang	
			Jumlah peserta yang mendapatkan pengetahuan ideologi wawasan kebangsaan	100 orang	
03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 2.872.417.276	JUMLAH KONFLIK POLITIK DI KOTA BUKITTINGGI	2 KASUS	
7	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp 2.872.417.276	Persentase partisipasi masyarakat pada Pemilu / Pilkada di Kota Bukittinggi	70%	
			Persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	8%	
			Persentase pengurus perempuan di Partai Politik	20%	
			Jumlah Parpol yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang akuntabel	8 Parpol	

15	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 78.726.750	Jumlah peserta yang mendapatkan Pendidikan Politik	50 orang	
			Jumlah pengurus partai politik yang mendapatkan pengetahuan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik	50 orang	
16	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 2.793.690.526	Jumlah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	8 Parpol	2 parpol
			Jumlah Pelaksanaan FGD Lintas Sektor Kota Bukittinggi	24 kali	8 kali
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 813.335.500	JUMLAH KONFLIK POLITIK DI KOTA BUKITTINGGI	2 KASUS	
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 813.335.500	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai AD/ART dan mengelola organisasinya sesuai AD/ART tersebut	80 organisasi	
17	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 43.236.000	Jumlah peserta yang mendapatkan pengetahuan di bidang Ormas	100 orang	
18	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 770.099.500	Jumlah Buku Data Ormas Kota Bukittinggi yang tersedia	30 buku	
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp 353.525.630	JUMLAH KONFLIK SOSIAL DI BUKITTINGGI	9 KASUS	
9	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 353.525.630	Jumlah kasus SARA	0 kasus	
			Jumlah kasus Narkoba	43 kasus	
19	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 53.708.880	Jumlah laporan kegiatan tes urine ASN	1 laporan	
20	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 299.816.750	Jumlah Laporan Peringatan HANI	1 laporan	1 laporan
			Jumlah Laporan KOMPANI	1 laporan	
			Jumlah Laporan PAKEM	1 laporan	
			Jumlah Peserta yang mendapatkan pengetahuan tentang narkoba	55 orang	
06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 522.901.324	JUMLAH KONFLIK SOSIAL DI BUKITTINGGI	9 KASUS	
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp 522.901.324	Jumlah potensi konflik sosial yang terdeteksi secara dini	3 kasus	
21	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 522.901.324	Jumlah Laporan Tim Kewaspadaan Dini Kota Bukittinggi	12 laporan	6 laporan
			Jumlah Laporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	1 laporan	
TOTAL		Rp 6.695.027.099			

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dan pencapaian Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi sampai dengan triwulan II tahun 2022 adalah sebagaimana tergambar dalam Tabel T-C 29 berikut ini.

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2022 KOTA BUKITINGGI

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2022)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12
8													
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
8	01					6.695.027.099		1.327.776.004					6.559.446.344
8	01	01											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	A	BB	A	1.860.027.369	N/A	699.462.610	N/A	38	A	1.757.159.919	A
8	01	01	2.01										
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang tersedia tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	7.225.000	1 dokumen	0	60	0	2 dokumen	7.080.500	98%
8	01	01	2.01	01									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang tersedia	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	7.225.000	1 dokumen	0	60	0	2 dokumen	7.080.500	98%
8	01	01	2.02										
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang dilaksanakan		100 persen	100 persen	1.618.321.769	40%	604.974.839	57	37	100 persen	1.537.405.681	95%
8	01	01	2.02	01									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	15 orang	15 orang	15 orang	1.618.321.769	12 orang	604.974.839	57	37	15 orang	1.537.405.681	95%
8	01	01	2.06										
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang dilaksanakan		100 persen	100 persen	111.677.000	48%	52.892.689	48	47	100 persen	107.499.800	100 persen
8	01	01	2.06	01									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang tersedia	3 komponen	5 komponen	5 komponen	764.000	-	0	0	0	5 komponen	764.000	100%
8	01	01	2.06	04									
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	40 jenis	24 jenis	24 jenis	12.000.000	24 jenis	8.719.100	85	73	24 jenis	12.000.000	100%
8	01	01	2.06	05									
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak yang tersedia	4 jenis	4 jenis	4 jenis	6.933.000	4 jenis	4.739.000	50	68	4 jenis	6.933.000	100%
8	01	01	2.06	08									
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu yang tersedia	100 orang	100 orang	100 orang	8.436.000	43 orang	1.522.000	50	18	100 orang	8.436.000	100%
8	01	01	2.06	09									
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	50 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	83.544.000	16 dokumen	37.912.589	79	45	50 dokumen	79.366.800	95%

8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Pengurus Partai Politik yang mendapatkan pengetahuan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik	Jumlah Pengurus Partai Politik yang mendapatkan pengetahuan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik : 50 orang Jumlah peserta yang mendapatkan	Jumlah peserta yang mendapatkan Pendidikan Politik : 160 orang	Jumlah Pengurus Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik Jumlah pengurus partai politik yang mendapatkan pengetahuan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik	78.726.750	-	0	0	0	Jumlah Pengurus Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik Jumlah pengurus partai politik yang mendapatkan pengetahuan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik	78.726.750	100%
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol Jumlah Pelaksanaan FGD Lintas Sektoral	Jumlah Pelaksanaan FGD Lintas Sektoral Kota Bukittinggi : 24 kali Jumlah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol : 8	Jumlah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol : 7 Parpol Jumlah Laporan Forum Diskusi Politik : 24 laporan	Jumlah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol : 8 parpol Jumlah Pelaksanaan FGD Lintas Sektoral : 24 kali	2.793.690.526	Jumlah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol : 2 parpol Jumlah Pelaksanaan FGD Lintas Sektoral : 8 kali	530.243.312	41	19	Jumlah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol : 8 parpol Jumlah Pelaksanaan FGD Lintas Sektoral : 24 kali	2.765.753.621	99%
8	01	04			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	2 kasus	2 kasus	2 kasus	813.335.500	N/A	20.882.410	N/A	3	2 kasus	813.335.500	2 kasus
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah organisasi masyarakat yang mempunyai AD/ART dan mengelola organisasinya sesuai AD/ART tersebut	80 organisasi	70 Organisasi	80 organisasi	813.335.500	-	20.882.410	0	3	80 organisasi	813.335.500	12 Organisasi
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta yang mendapatkan pengetahuan di bidang Ormas	100 orang	-	100 orang	43.236.000	-	6.033.000	0	14	100 orang	43.236.000	100%
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Buku Data Ormas Kota Bukittinggi yang tersedia	30 buku	40 buku	30 buku	770.099.500	-	14.849.410	30	2	30 buku	770.099.500	100%
8	01	05			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Jumlah Konflik Sosial di Kota Bukittinggi	9 kasus	5 kasus	9 kasus	353.525.630	N/A	32.543.149	N/A	9	9 kasus	353.525.630	9 kasus
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Kasus SARA Jumlah kasus Narkoba	Jumlah Kasus SARA : 0 kasus Jumlah kasus	Jumlah Kasus SARA : 0 kasus Jumlah kasus Narkoba : 43 kasus	3 kasus	353.525.630	N/A	32.543.149	N/A	9	3 kasus	353.525.630	3 kasus
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah ASN yang dites narkoba	250 orang	1	1 laporan	53.708.880	1 laporan	2.065.000	0	4	1 laporan	53.708.880	100%
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan HANI Jumlah laporan KOMPANI Jumlah Laporan PAKEM Jumlah Peserta yang mendapatkan pengetahuan tentang narkoba	Jumlah Laporan Peringatan HANI : 1 laporan Jumlah laporan KOMPANI : 1 laporan Jumlah Laporan PAKEM : 1 laporan Jumlah Peserta yang mendapatkan pengetahuan tentang narkoba : 250	Jumlah Laporan PAKEM : 1 laporan	1 laporan	299.816.750	1 laporan	30.478.149	50	10	1 laporan	299.816.750	100%

8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial di Kota Bukittinggi	9 kasus	5 kasus	1 laporan	522.901.324	N/A	43.312.523	N/A	8	1 laporan	522.901.324	9 kasus
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang terdeteksi secara dini	3 kasus	3 kasus	3 kasus	522.901.324	N/A	43.312.523	N/A	8	3 kasus	522.901.324	3 kasus
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan Tim Kewaspadaan Dini Kota Bukittinggi Jumlah laporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Kewaspadaan Dini Kota Bukittinggi : 12 laporan Jumlah Laporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial : 1 laporan	Jumlah laporan Tim Kewaspadaan Dini Kota Bukittinggi : 8 laporan Jumlah laporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial : 1 laporan	Jumlah laporan Tim Kewaspadaan Dini Kota Bukittinggi : 12 laporan Jumlah laporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial : 1 laporan	522.901.324	6 laporan	43.312.523	46,15 %	8	Jumlah laporan Tim Kewaspadaan Dini Kota Bukittinggi : 12 laporan Jumlah laporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial : 1 laporan	522.901.324	100%

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian rencana kerja pada triwulan I dan II baik terhadap realisasi pencapaian target kegiatan maupun penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Dari hasil evaluasi tersebut diketahui perlunya dilakukan perubahan terhadap program dan kegiatan yang meliputi perubahan pagu, kelompok sasaran, target kinerja dan penghapusan kegiatan. Perubahan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkiraan SILPA kegiatan dalam tahun berjalan.
2. Penghapusan kegiatan yang tidak mungkin dilakukan karena terjadinya perubahan kinerja dan kebijakan atau pola pelaksanaan kegiatan.
3. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.
4. Pergeseran/ *Refocussing* anggaran.
5. Perubahan atas dasar pertimbangan lain yang dirasa perlu dan mendesak.

Rencana perubahan program dan kegiatan yang disesuaikan tersebut dituangkan dalam bentuk perubahan anggaran kegiatan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.1							
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN							
DALAM PERUBAHAN RENJA OD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022							
Nama Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik							
Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)			
8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01			6.695.027.099	6.000.596.145	-694.430.954	
8	01	01		1.860.027.369	2.124.717.369	264.690.000	
8	01	01	2.01	7.225.000	6.490.000	-735.000	
8	01	01	2.01	7.225.000	6.490.000	-735.000	
8	01	01	2.02	1.618.321.769	1.728.416.769	110.095.000	
8	01	01	2.02	1.618.321.769	1.728.416.769	110.095.000	

8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.677.000	276.472.000	164.795.000
8	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	764.000	764.000	0
8	01	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		132.300.000	132.300.000
8	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	11.510.000	-490.000
8	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.933.000	8.593.000	1.660.000
8	01	01	2.06	Fasilitas Kunjungan Tamu	8.436.000	7.701.000	-735.000
8	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.544.000	115.604.000	32.060.000
8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.945.000	31.400.000	-545.000
8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.485.000	1.400.000	-85.000
8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.460.000	30.000.000	-460.000
8	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.858.600	81.938.600	-8.920.000
8	01	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.150.000	27.700.000	-2.450.000
8	01	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.400.000	4.940.000	-460.000
8	01	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.308.600	49.298.600	-6.010.000
8	01	02		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	272.820.000	269.360.000	-3.460.000
8	01	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	272.820.000	269.360.000	-3.460.000
8	01	02	2.01	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	238.820.000	235.850.000	-2.970.000
8	01	02	2.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	34.000.000	33.510.000	-490.000
8	01	03		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	2.872.417.276	2.553.243.142	-319.174.134
8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas	2.872.417.276	2.553.243.142	-319.174.134
8	01	03	2.01	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	78.726.750	78.236.750	-490.000
8	01	03	2.01	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	2.793.690.526	2.475.006.392	-318.684.134
8	01	04		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	813.335.500	202.100.500	-611.235.000

8	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	813.335.500	202.100.500	-611.235.000
8	01	04	2.01	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	43.236.000	32.246.000	-10.990.000
8	01	04	2.01	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	770.099.500	169.854.500	-600.245.000
8	01	05		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	353.525.630	345.790.630	-7.735.000
8	01	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	353.525.630	345.790.630	-7.735.000
8	01	05	2.01	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	53.708.880	52.973.880	-735.000
8	01	05	2.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	299.816.750	292.816.750	-7.000.000
8	01	06		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	522.901.324	505.384.504	-17.516.820
8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	522.901.324	505.384.504	-17.516.820
8	01	06	2.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	522.901.324	505.384.504	-17.516.820

Berdasarkan Tabel 3.1. di atas, terdapat penambahan anggaran untuk sub kegiatan berikut ini:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Anggaran untuk sub kegiatan ini ditambah Rp.110.095.000,- dalam rangka menambah kekurangan anggaran belanja pada rekening Tambahan Penghasilan dan pergeseran sub kegiatan honorarium pengelolaan keuangan dan honor pengadaan barang dan jasa dari semua rekening kegiatan ke sub kegiatan ini.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Anggaran untuk sub kegiatan ini ditambah sebesar Rp 132.300.000,- dalam rangka penyediaan komputer unit dalam rangka persiapan peubahan nomenklatur Kantor Kesbangpol menjadi Badan.
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Anggaran untuk sub kegiatan ini ditambah sebesar Rp.2.150.000,- dalam rangka menambah kekurangan belanja fotocopy dan jilid di kantor

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Anggaran untuk sub kegiatan ini ditambah sebesar Rp.35.000.000,- untuk menambah kekurangan Perjalanan Dinas Biasa sampai akhir tahun 2022.
5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Anggaran untuk sub kegiatan ini ditambah sebesar Rp.150.000.000,- untuk menambah Kekurangan Perjalanan Dinas Biasa sampai akhir tahun 2022.
6. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah. Anggaran untuk sub kegiatan ini ditambah sebesar Rp.5.178.730,-.

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Perincian	Praktoran Mula Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Sebelum	Sesudah	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												6,095,027,099	6,000,005,929			7,423,900,000		
8.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1,940,027,369	2,061,446,789			2,411,900,000		
8.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												7,225,000	7,225,000			40,000,000		
8.01.01	2.0.01	01	Persyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah dokumen Rencma dan Renja yang disusun	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A	A	2 dokumen	2 dokumen	80 %	80 %	7,225,000	7,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Absekal Umum	Nilai SAKIP SKPD	A	40,000,000
8.01.01	2.0.02	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,618,321,769	1,668,721,769			1,900,000,000		
8.01.01	2.0.02	01	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Persentase tertib administrasi keuangan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A	A	15 orang	15 orang	100 %	100 %	1,618,321,769	1,668,721,769	Dana Transfer Umum-Dana Absekal Umum	Nilai SAKIP SKPD	A	1,900,000,000
8.01.01	2.0.04	04	Administrasi Umum Perangkat Daerah										111,677,000	262,696,400			315,400,000		
8.01.01	2.0.06	01	Penyelesaian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A	A	5 komponen	5 komponen	100 %	100 %	704,000	704,000	Dana Transfer Umum-Dana Absekal Umum	Nilai SAKIP SKPD	A	1,400,000
8.01.01	2.0.06	03	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli: komputer/pc Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli: Laptop Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli: printer Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli: scanner	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A	A	2 unit 1 unit	4 unit 4 unit 2 unit 2 unit	100 %	100 %	0	133,869,400	Dana Transfer Umum-Dana Absekal Umum	Nilai SAKIP SKPD	A	150,000,000
8.01.01	2.0.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A	A	24 jenis	24 jenis	100 %	100 %	12,000,000	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Absekal Umum	Nilai SAKIP SKPD	A	13,000,000
8.01.01	2.0.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A	A	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	6,933,000	6,933,000	Dana Transfer Umum-Dana Absekal Umum	Nilai SAKIP SKPD	A	8,000,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Penting	Praktisan Mula Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Kebaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
					Program		Kebaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum				Setelah	Tolok Ukur	Target	
					Sebelum		Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum									Setelah
8.01.01.2.0.0.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah tamu yang dibayari	Persentase terisi administrasi umum perangkat daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kacamatan, Semua Kelurahan	A	A	100 orang	100 orang	100 %	100 %	8.416,000	8.430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A	8.000,000	
8.01.01.2.0.0.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Persentase terisi administrasi umum perangkat daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kacamatan, Semua Kelurahan	A	A	50 dokumen	50 dokumen	100 %	100 %	81.544,000	118.544,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A	135.000,000	
8.01.01.2.0.0.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												31.945,000	31.945,000					
8.01.01.2.0.0.01	Penyediaan Jasa Surat Mengurus	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah surat-surat masuk dan surat- surat keluar dalam 1 tahun	Persentase kelengkapan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kacamatan, Semua Kelurahan	A	A	1000 surat	1000 surat	100 %	100 %	1.485,050	1.485,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A	1.500,000	
8.01.01.2.0.0.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	Persentase kelengkapan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kacamatan, Semua Kelurahan	A	A	100 mbps 1 rekening	100 mbps 1 rekening	100 %	100 %	30.460,000	30.460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A	30.000,000	
8.01.01.2.0.0.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												90.858,600	90.858,600					
8.01.01.2.0.0.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Fajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Kota Bukittinggi, Semua Kacamatan, Semua Kelurahan	A	A	3 unit	3 unit	80 %	80 %	30.150,000	30.150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A	45.000,000	
8.01.01.2.0.0.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Kota Bukittinggi, Semua Kacamatan, Semua Kelurahan	A	A	6 unit	6 unit	80 %	80 %	3.400,000	3.400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A	7.000,000	
8.01.01.2.0.0.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Kota Bukittinggi, Semua Kacamatan, Semua Kelurahan	A	A	1 unit	1 unit	80 %	80 %	55.308,600	55.308,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A	85.000,000	
8.01.2	PROGRAM PENGIATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN												272.820,000	272.820,000					
8.01.2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan												272.820,000	272.820,000					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Bencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Perif 9	Praktisan Maju Bencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keleasan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keleasan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum				Setelah	Teluk Ukur	Target
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah							
8.01.02.1.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kewarganegaraan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Korrib Sosial di Kota Bukittinggi	Jumlah Pelaksanaan Upacara	Jumlah korrib sosial di kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 kasus	9 kasus	5 upacara	5 upacara	9 kasus	9 kasus	238,820,000	238,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Korrib Sosial di Kota Bukittinggi	9 kasus	220,000,000	
8.01.02.1.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kewarganegaraan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Korrib Sosial di Kota Bukittinggi	Jumlah peserta yang menandatangani pengetahuan Bela Negara Jumlah peserta yang mendapatkan pengetahuan ideologi Wawasan Kebangsaan	Jumlah korrib sosial di kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 kasus	9 kasus	40 orang 100 orang	40 orang 100 orang	9 kasus	9 kasus	34,000,000	34,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Korrib Sosial di Kota Bukittinggi	9 kasus	70,000,000	
8.01.5	PROGRAM PEMINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											2,672,417,276	2,572,873,276			3,950,000,000		
8.01.3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kewarganegaraan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											2,672,417,276	2,572,873,276			3,890,000,000		
8.01.03.1.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kewarganegaraan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah korrib politik di Kota Bukittinggi	Jumlah Pengurus Partai Politik yang mendapatkan pengetahuan tentang bantuan keuangan Partai Politik Jumlah peserta yang mendapatkan Pendidikan Politik	Partisipasi Masyarakat pada Pemilu/Pilkada di Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 kasus	2 kasus	50 orang 50 orang	50 orang 50 orang	70 %	70 %	78,726,750	78,726,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah korrib politik di Kota Bukittinggi	2 kasus	150,000,000	
8.01.03.1.05	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kewarganegaraan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah korrib politik di Kota Bukittinggi	Jumlah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol Jumlah kemudahan akses operasional Jumlah Pelaksanaan FGD Lintas Sektorial Kota Bukittinggi Jumlah peralatan kantor : Laptop Jumlah peralatan kantor : Printer	Partisipasi Masyarakat pada Pemilu/Pilkada di Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 kasus	2 kasus	8 Pargol 24 kali	8 Pargol 24 kali 2 unit 1 unit	70 %	70 %	2,793,690,526	2,494,146,576	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah korrib politik di Kota Bukittinggi	2 kasus	2,900,000,000	
8.01.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KOMUNITAS											813,335,500	283,335,500			145,000,000		
8.01.4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Komunitas											813,335,500	283,335,500			145,000,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Praktis Mula Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Evaluasi Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Catatan n Perfektif B	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Kategori Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah		Tolak Ukur	Target
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah							
8.01.1.05.0.00.04.0000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Medalai Singkerta Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	Jumlah Peserta yang mendapatkan pengetahuan dibidang Ormas	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai AD/ART dan menggalakan organisasinya sesuai AD/ART tersebut	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 kasus	2 kasus	100 orang	100 orang	80 organisasi	80 organisasi	43.235.000	31.235.000	Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	2 kasus	100.000.000	
8.01.1.05.0.00.04.0000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Medalai Singkerta Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	Jumlah Buku Data Ormas Kota Bukittinggi yang tersedia	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai AD/ART dan menggalakan organisasinya sesuai AD/ART tersebut	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 kasus	2 kasus	30 buku	30 buku	80 organisasi	80 organisasi	770.000.000	170.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	2 kasus	45.000.000	
8.01.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA											353.525.630	353.525.630			657.000.000		
8.01.5.0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya											353.525.630	353.525.630			657.000.000		
8.01.1.05.0.00.04.0000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kamukom Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Konflik Sosial di Kota Bukittinggi	Jumlah Laporan Kegiatan Tes Ulini ASN	Jumlah kasus narkotika	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 kasus	3 kasus	1 laporan	1 laporan	3 kasus	43 kasus	33.700.000	33.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum	Jumlah Konflik Sosial di Kota Bukittinggi	3 kasus	57.000.000	
8.01.1.05.0.00.04.0000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kamukom Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Konflik Sosial di Kota Bukittinggi	Jumlah Peserta yang mendapatkan pengetahuan tentang narkoba	Jumlah kasus narkoba	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 kasus	3 kasus	55 orang 1 laporan 1 laporan 1 laporan	55 orang 1 laporan 1 laporan 1 laporan	5 kasus	43 kasus	299.810.750	299.810.750	Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum	Jumlah Konflik Sosial di Kota Bukittinggi	3 kasus	600.000.000	
8.01.5	PROGRAM PENINGKATAN KEMADPRADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											522.901.324	518.604.654			670.000.000		
8.01.5.0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial											522.901.324	518.604.654			670.000.000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Unsur/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Kebaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Kebaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Konflik Sosial di Kota Bukittinggi	Jumlah laporan Tim Kewaspadaan Diri Kota Bukittinggi	Jumlah patner konflik sosial yang berkeleki secara dini	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 kasus	9 kasus	12 laporan	12 laporan	3 kasus	3 kasus	522,001,324	516,004,654	Dana Transfer Umum-Dana Abseas Umum	Jumlah Konflik Sosial di Kota Bukittinggi	9 kasus	870,000,000	
TOTAL						6,695,027,099	6,695,027,099					6,695,027,099	6,695,027,099				7,423,900,000	

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2022 dimaksudkan untuk memaksimalkan pelaksanaan rencana Kerja SKPD dan rencana kerja anggaran SKPD hingga akhir Tahun Anggaran 2022. Perubahan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja yang sudah berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 dan Pergeseran Anggaran/Refocussing Tahun Anggaran 2022.

Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2022 sangat terbatas, hanya pada Triwulan IV Tahun 2022, maka perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat serta berkualitas untuk semua kegiatan, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana serta memenuhi capaian indikator baik dalam RPJMD maupun Renstra. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renstra namun tidak tercantum dalam renja dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, indikator kinerja telah tercapai pada tahun sebelumnya, adanya penyesuaian nama program dan kegiatan demi keselarasan indikator kinerja maupun perubahan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan.

Kiranya Rencana Kerja Perubahan ini dapat dijadikan acuan atau pedoman oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, sehingga dapat berhasil guna, bermanfaat bagi kita semua dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Bukittinggi.

WALIKOTA BUKITTINGGI

HERMAN SAFAR